

## Gibran Kerahkan 3 Pengacara .....

Dari Halaman 1

"Kami tiga orang," kata Pengacara Dadang Herli Saputra.

Dadang belum bisa memastikan apakah Gibran selaku principal akan hadir langsung di persidangan atau tidak. Dia juga mengaku belum ada arahan khusus dari Gibran terkait dengan sidang ini.

"Belum ada arahan khusus, saya kira biasa

saja. Nanti untuk berikutnya masih ada tahapan lain," kata dia.

Perkara ini diperiksa oleh majelis hakim yang terdiri dari Budi Prayitno, Abdul Latip dan Arlen Veronica. Adapun penggugat atas nama Subhan yang memiliki latar belakang sebagai pengacara.

Dalam petitumnya, Subhan meminta majelis hakim menyatakan Gibran tidak sah menjadi Wakil Presiden RI periode 2024-2029. Sebab,

Gibran tidak pernah sekolah SMA sederajat yang diselenggarakan berdasarkan hukum RI, sehingga tidak memenuhi syarat dalam pendaftaran Cawapres pada Pilpres lalu.

Selain itu, Subhan juga meminta majelis hakim menghukum Gibran dan KPU membayar kerugian materil dan immateriil sebesar Rp125 triliun. Uang itu diminta untuk disetorkan ke kas negara lalu selanjutnya dibagikan ke setiap warga negara.(cnni/js)

## Anggota DPRD Sumut Usir Wartawan .....

Dari Halaman 1

ruangan Komisi E guna meliput situasi rapat bersama Dinas Pendidikan Sumut, Edi Surahman Sinuraya bersikap tidak beretika dengan mengusir wartawan secara kasar dan tidak mencerminkan perilaku sebagai wakil rakyat.

"Kamu siapa? Kamu siapa?, ngapai kamu di sini?" ucap Ari menirukan pernyataan Edi Sinuraya yang saat itu juga dibarengi sembari berdiri dari kursi pimpinan rapat dan mengusir wartawan Mistar dengan mendongakkan kepala sembari mengucapkan nada keras, Senin (15/9/2025) di Ruang Komisi E DPRD Sumut.

"Saya wartawan di sini yang meliput pak, kenapa saya diusir," kata Ari menanggapi Perny-

ataan Edi Sinuraya saat itu.

Melihat situasi dan kondisi yang langsung hening seakan perdebatan antara Edi Sinuraya dan wartawan, Ketua Komisi E DPRD Sumut, Subandi, langsung meleraikan.

"Sudah, sudah ri, kami izin rapat tertutup dulu ya," ucap Politisi Gerindra kepada wartawan Mistar dengan nada lembut sembari meleraikan perdebatan tersebut.

### MEMBANTAH

Sementara itu terpisah, Sekretaris Komisi E DPRD Sumut Edi Surahman Sinuraya usai pertemuan membantah kalau dirinya mengusir salah seorang wartawan dari ruangan saat digelar rapat internal Komisi E dengan Kadisdik Sumut Alexander Sinulingga, Senin (15/9) di DPRD Sumut.

"Tidak ada saya mengusir wartawan, tapi hanya bertanya siapa dia, karena tiba-tiba masuk dan memfoto-foto rapat internal Komisi E dengan Kadisdik Sumut," tandas Edi Surahman

Hal senada juga disampaikan Ketua Komisi E HM Subandi, bahwa Edi Surahman tidak ada mengusir wartawan, tapi hanya bertanya dan menyampaikan kepada rekan wartawan, bahwa rapat bersifat internal.

"Tidak benar pak Edi Surahman mengusir wartawan. Dia hanya bertanya kepada rekan kita wartawan yang saat itu langsung memfoto-foto rapat internal, karena pertemuan tertutup untuk rekan-rekan wartawan, sebab sedang membahas KUA-PPAS yang sifatnya masih internal," ujar Subandi yang mengaku saat itu sedang memimpin pertemuan.(A-06)

## Prabowo Diskon BPJS 50% Untuk 731 Ribu .....

Dari Halaman 1

dan JKM (jaminan kematian), "kata Airlangga pada jumpa pers di Kantor Presiden, Jakarta, Senin (15/9).

Airlangga mengatakan, anggaran yang dibutuhkan untuk kebijakan ini Rp36 miliar. Anggaran itu akan disiapkan oleh BPJS Ketenagakerjaan.

Ia berkata ojol dan pekerja BPU lain-

nya tetap mendapatkan manfaat yang sama meski menerima diskon. Tak akan ada pengurangan manfaat selama periode diskon ini.

"JKK santunan kematian 48 kali upah, cacat 56 kali upah, beasiswa 174 juta untuk dua orang anak. JKM itu totalnya bisa menerima Rp42 juta," ucap Airlangga.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto meluncurkan sejumlah paket kebijakan. Delapan kebijakan insentif ekonomi akan

diberikan hingga Desember 2025 dengan anggaran sekitar Rp16 triliun.

Ada pula empat kebijakan tahun ini yang akan dilanjutkan pada 2026. Salah satunya Program Diskon Iuran JKK dan JKM untuk semua penerima bukan penerima upah (BPU). Program ini menargetkan pekerja seperti tukang ojek.

Kemudian, ada lima program penyerapan tenaga kerja. Salah satunya revitalisasi tambak di Pantai Utara (Pantura) Jawa.(cnni/js)

## Mahasiswa Bentrok dengan Polisi .....

Dari Halaman 1

menjadi "titik api" baru di Timor Leste, di tengah kondisi penduduknya yang hidup di bawah garis kemiskinan menurut Bank Dunia.

"Kami meminta anggota parlemen untuk membatalkan keputusan pembelian (Toyota) Prado. Jika tidak, kami akan tetap berdiri di sini," kata seorang mahasiswa dari Universidade da Paz, Leonito Carvalho.

Demonstrasi yang mulanya berlangsung damai berakhir ricuh setelah polisi bergerak menembakkan gas air mata, usai beberapa pengunjung rasa melemparkan batu ke arah gedung parlemen.

Tembakan gas air mata ini melukai empat orang pengunjung rasa, yang kemudian dibawa ke fasilitas kesehatan terdekat.

Pejabat polisi nasional Timor Leste, Justino Menezes, mengatakan pihak berwenang akan memanggil koordinator unjuk rasa untuk menun-

tut pertanggungjawaban atas kerusakan tersebut.

Beberapa partai politik Timor Leste yang tahun lalu menyetujui anggaran 2025 untuk membeli mobil baru mengatakan akan meminta parlemen untuk membatalkan rencana itu.

Dalam pernyataan bersama, sejumlah partai seperti Kongres Nasional untuk Rekonstruksi Timor, Partai Demokrat, dan Perikaya Persatuan Nasional Putra-Putra Timor menyatakan bahwa pembelian tersebut "tidak mencerminkan kepentingan publik".(cnni/js)



## KPK Terima Pengembalian Uang .....

Dari Halaman 1

penyidik KPK pada Selasa, 9 September 2025. Pemeriksaan tersebut berlangsung selama sekitar 7,5 jam. Saat itu, Khalid merasa menjadi korban.

Khalid menjelaskan, pada awalnya terdaftar sebagai jemaah haji program furoda. Namun, dalam prosesnya dia mengaku ditawarkan oleh pemilik travel haji dan umrah PT Muhibbah Mulia Wisata Pekanbaru Ibnu Mas'ud untuk kuota haji khusus.

"Sehingga akhirnya kami ikut dengan visa itu di-travel-nya dia di Muhibbah," kata Khalid kepada awak media di Kantor KPK, Jakarta, Selasa (9/9) malam.

"Posisi kami ini korban dari PT Muhibbah yang dimiliki oleh Ibnu Mas'ud. Kami tadinya semua furoda. Ditawarkan lah untuk pindah menggunakan visa ini," sambungnya.

Khalid menjelaskan dirinya bersama jemaah Uhad Tour pada akhirnya melaksanakan ibadah haji lewat kuota khusus yang ditawarkan oleh PT Muhibbah Mulia Wisata Pekanbaru.

"Jumlahnya 122 (jemaah)," kata Khalid yang juga merupakan Ketua Asosiasi Mutiara Haji. Dia enggan berbicara ongkos yang dibayar

terkait pelaksanaan ibadah haji melalui kuota khusus tersebut. Dia menyerahkan sepenuhnya kepada pengacaranya.

"Nanti selebihnya kembali ke kuasa hukum kami," tandasnya.

Wartawan belum memperoleh keterangan dari Ibnu Mas'ud mengenai pengakuan dari Khalid tersebut.

Ibnu Mas'ud sempat masuk dalam daftar saksi yang hendak diperiksa KPK pada Kamis, 28 Agustus lalu. Dia pun memenuhi panggilan pemeriksaan tersebut.

Dalam proses penyidikan berjalan, KPK baru saja menyita dua unit rumah di Jakarta Selatan seharga Rp6,5 miliar yang dibeli secara tunai oleh salah seorang ASN Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Kementerian Agama.

Sumber uang untuk membeli rumah tersebut diduga berkaitan dengan kasus dugaan korupsi kuota haji tambahan.

Selain itu, KPK juga menyita sejumlah uang dengan total US\$1,6 juta, 4 (empat) unit kendaraan roda empat, serta 5 (lima) bidang tanah dan bangunan.

KPK tidak merinci dari mana penyitaan terse-

but berasal. Penyidik masih akan terus mendalami aliran uang terkait praktik jual beli kuota tambahan haji 2023-2024 tersebut.

Berdasarkan perhitungan awal KPK, ditemukan kerugian negara dalam kasus dugaan korupsi kuota haji tambahan tahun 2023-2024 mencapai Rp1 triliun lebih. Temuan ini akan dikoordinasikan lebih lanjut dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Dalam proses penyidikan berjalan, tepatnya pada 11 Agustus 2025, KPK mengeluarkan Surat Keputusan tentang larangan bepergian ke luar negeri untuk mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas, staf khususnya Ishfah Abidal Aziz, dan pemilik agen perjalanan Maktour Travel, Fuad Hasan Masyhur.

KPK juga sudah menggeledah sejumlah tempat seperti rumah kediaman Yaqut di Condut, Jakarta Timur, kantor agen perjalanan haji dan umrah di Jakarta, rumah ASN Kementerian Agama di Depok, hingga ruang Ditjen PHU Kementerian Agama.

Banyak barang bukti diduga terkait perkara disita. Di antaranya dokumen, Barang Bukti Elektronik (BBE), hingga kendaraan roda empat dan properti.(cnni/js)

## Di Deliserdang: Jalan Rusak Sebelum Waktunya .....

Dari Halaman 1

Namun kenyamanan itu tampaknya tak akan berumur panjang. Potensi jalan mulus kembali rusak sangatlah besar. Ada dua sebab utama. Pertama, kualitas pekerjaan yang patut dipertanyakan. Warga mendapati proyek tanpa papan informasi, tanpa transparansi anggaran, tanpa kejelasan siapa kontraktornya. Padahal undang-undang mewajibkan semua itu dipublikasikan. Jika aturan dasar saja dilanggar, bagaimana rakyat bisa yakin pekerjaan sesuai spesifikasi?

Kedua, jalan dihajar truk-truk bertonase besar

yang bebas melintas. Jalan kampung yang sempit dipaksa menanggung beban raksasa. Aspal mana yang bisa bertahan? Akhirnya, jalan yang baru diaspal cepat sekali bopeng. Jalan Sederhana Desa Sambirejo Timur, Jalan Pasar 6 Bandar Klippa, Jalan Beringin Pasar 7 Tembung, hingga Jalan Kapten Batu Sihombing jadi bukti nyata. Warga masih ingat suara alat berat menggiling aspal, tapi belum lama kemudian lubang kembali menganga, menunggu korban.

Kini, badan-badan jalan itu sedang diperbaiki tentunya dengan menggunakan anggaran bernilai rupiah. Maka akan sangat ironis jika proyek mili-

aran rupiah yang katanya untuk rakyat justru tak pernah memberi umur panjang bagi kenyamanan rakyat. Lebih menyakitkan, tak satu pun aparat hadir mencegah. Tak ada pengawasan, tak ada pembatasan tonase, tak ada petugas yang peduli. Jalan rakyat seolah memang ditakdirkan untuk jadi korban.

Dan rakyat pun hanya bisa menggigit bibir. Uang pajak mereka lenyap di jalan berlubang, sementara derita tak pernah selesai. Jika jalan baru saja sudah hancur, lalu ke mana lagi rakyat harus berharap? Sampai kapan uang rakyat dikorbankan untuk jalan yang hanya sebentar bertahan?

## Pemerintah Bentuk .....

Dari Halaman 1

Zulkifli Hasan. "Tim akselerasi program prioritas yang nanti akan dipimpin oleh Menko Perekonomian dan Menko pangan," kata Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (15/9).

Airlangga menyampaikan akan duduk sebagai wakil dari tim tersebut sejumlah menteri terkait mulai dari Menteri Keuangan, Menteri Investasi, Kepala BKPM, dan Menteri PPN/Bappenas.

"Beranggotakan seluruh menteri yang terkait dengan program," ujar dia. Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa menjelaskan tim percepatan itu akan bertugas mengawasi seluruh program utama pemerintah.

Selain itu, ia menyampaikan tim tersebut juga akan menerima aduan dari pelaku bisnis yang merasa masih ada gangguan selama menjalankan bisnis mereka.

Setelah menerima laporan, mereka akan bersidang dalam sepekan sekali membahas laporan tersebut.

"Jadi ini seperti Pokja 4 di zaman sebelumnya, diharapkan dengan adanya tim ini seluruh hambatan di sektor swasta bisa kita hilangkan dengan signifikan, sehingga mesin pertumbuhan swasta juga bisa tumbuh dengan baik seiring dengan mesin pertumbuhan punya pemerintah," ucapnya.(cnni/js)

## Polisi Gerebek Gudang ....

Dari Halaman 1

menjadi gudang penyimpanan itu, polisi turut menyita sejumlah barang bukti, antara lain 88 lembar pecahan USD 100 sebanyak 32 lembar dan pecahan uang Rp100 ribu yang diduga palsu.

Dari penyelidikan sementara, WG diketahui berperan menyediakan uang dolar palsu. Sementara H berperan merayu atau mengiming-imingi korban untuk membeli uang palsu tersebut.

"Modus pelaku dalam menjalankan aksinya dengan memberikan iming-iming mendapatkan uang. Dari kelima orang yang menjadi korban, total kerugian yang dialami sebesar Rp75 juta," ucap Nicolas.

Disampaikan Nicolas, saat ini kedua pelaku telah dibawa ke Polres Metro Jakarta Selatan untuk diperiksa lebih lanjut. Termasuk, mendalami apakah ada pelaku lain yang terlibat.

"Pengembangan guna mengungkap kemungkinan adanya pelaku lain," katanya.(cnni/js)



## Nepal Alarm Bagi Indonesia

Dari Halaman 1

bangunan yang cukup panjang. Meski menerima bantuan internasional dalam jumlah besar, negara ini gagal mengelola sumber daya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyatnya. Data Bank Dunia (2024) menunjukkan bahwa hampir 20 persen penduduk Nepal masih hidup di bawah garis kemiskinan, sementara angka pengangguran dan migrasi pekerja keluar negeri tetap tinggi. Situasi ini diperburuk oleh ketergantungan pada remitansi uang kiriman pekerja Nepal dari luar negeri yang menyumbang lebih dari 20 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Kondisi demikian menggambarkan lemahnya kemandirian ekonomi.

Apa relevansinya bagi Indonesia? Pertama, kasus Nepal memperlihatkan bahaya ketergantungan pada remitansi dan utang luar negeri tanpa diimbangi penguatan sektor produktif domestik. Indonesia, meski memiliki basis ekonomi yang lebih besar, juga masih rentan. Kontribusi remitansi pekerja migran Indonesia mencapai lebih dari Rp160 triliun per tahun. Jika sektor dalam negeri tidak mampu menyerap tenaga kerja dengan layak, ketergantungan ini bisa menjadi bom waktu sebagaimana yang dialami Nepal.

Kedua, Nepal mengingatkan tentang rapuhnya sistem politik yang tidak stabil. Sejak menjadi republik pada 2008, negara itu telah mengalami belasan kali pergantian perdana menteri. Elit politik lebih sibuk berebut kekuasaan ketimbang menata sistem pembangunan. Bagi Indonesia, meski memiliki stabilitas politik relatif lebih baik, gejala serupa terlihat dalam sikap partai-partai yang kerap memomorduakan kepentingan rakyat demi transaksi politik jangka pendek. Jika tidak diantisipasi, demokrasi bisa terjebak dalam stagnasi kebijakan, sebagaimana Nepal.

Ketiga, Nepal juga menunjukkan dampak buruk dari lemahnya investasi di sektor infrastruktur dan layanan dasar. Akses listrik, pendidikan, dan kesehatan di banyak wilayah pedalaman Nepal masih jauh dari memadai. Indonesia bisa bercermin pada persoalan serupa, terutama di wilayah timur. Ketimpangan pembangunan bisa menjadi sumber kerentanan politik dan sosial, apalagi di era digital ketika ketidakadilan dengan mudah disebar dan dibandingkan.

Alarm terakhir dari Nepal adalah bahaya hilangnya kepercayaan publik terhadap negara. Di tengah krisis, rakyat Nepal justru lebih mempercayai lembaga internasional, organisasi non-pemerintah, bahkan kelompok-kelompok informal, ketimbang pemerintah mereka sendiri. Jika jurang ketidakpercayaan ini melebar, negara bisa kehilangan legitimasi. Indonesia harus belajar bahwa stabilitas jangka panjang hanya bisa dibangun dengan akuntabilitas, transparansi, dan keberpihakan nyata pada kepentingan rakyat.

Dari pengalaman Nepal, ada tiga pelajaran penting untuk Indonesia. Pertama, membangun kemandirian ekonomi dengan mengurangi ketergantungan pada remitansi dan utang, serta memperkuat sektor riil yang menyerap tenaga kerja. Kedua, menjaga stabilitas politik dengan menempatkan kepentingan rakyat di atas transaksi elit. Ketiga, mempercepat pemerataan pembangunan agar kepercayaan publik terhadap negara tetap terjaga.

Nepal memang jauh, tetapi alarmnya dekat dengan kita. Negara itu memperlihatkan bagaimana kegagalan tata kelola politik dan ekonomi dapat menyeret rakyat dalam lingkaran krisis tanpa ujung. Indonesia, dengan potensi besar yang dimiliki, seharusnya tidak mengulangi kesalahan yang sama. Alarm Nepal harus menjadi pengingat: jangan sampai kita terlena, lalu mendapati diri dalam krisis yang serupa.